# Koordinasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Identifikasi Korban Bencana pada Gempa Cianjur Tahun 2022

## *Coordination between the Indonesian National Police (POLRI) Disaster Victim Identification (DVI) Team and Relevant Agencies in Handling Victim Identification Following the 2022 Cianjur Earthquake*

**Alfi Fabian Rizqullah[1], Bhakti Nur Avianto[2]**
[1,2]Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Pejaten, Pasar Minggu – Jakarta Selatan – Indonesia

***Corresponding Author:** E-mail: alfifabian9b@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis koordinasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dengan instansi terkait dalam penanganan identifikasi korban Gempa Cianjur Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposif sebanyak tujuh orang yang terdiri atas unsur pimpinan, koordinator, dokter forensik dan pelaksana Tim DVI Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Cianjur, serta keluarga korban. Analisis menggunakan teori koordinasi Soewarno Handayaningrat (2005), yang meliputi komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan; dan model collaborative governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Tim DVI Polri dengan instansi terkait telah berjalan cukup efektif berdasarkan terpenuhinya indikator penelitian, tetapi belum sepenuhnya optimal dan terlembagakan. Koordinasi didukung oleh kejelasan pembagian tugas, kompetensi personel, pengalaman kerja sama, kesamaan tujuan kemanusiaan, komitmen profesional, dukungan pimpinan, keberadaan Pos DVI, fasilitas rumah sakit, dan keterlibatan keluarga korban. Faktor penghambatnya meliputi perubahan kondisi lapangan, kerusakan akses dan dokumen korban, keterbatasan data ante mortem, komunikasi berjenjang, belum terintegrasinya data antarinstansi, ketidakmerataan tenaga ahli, serta tingginya beban kerja personel. Temuan konseptual penelitian menunjukkan pola kolaborasi antarinstansi dengan koordinasi terpadu dan otoritas teknis terpusat. Koordinasi terpadu menghubungkan tugas, informasi, kompetensi, dan sumber daya; proses kolaboratif membangun partisipasi serta kepercayaan; sedangkan otoritas teknis Tim DVI menjaga validitas dan akuntabilitas penetapan identitas.

**Keywords:** Koordinasi Antarinstansi, Collaborative Governance, Tim DVI Polri, Identifikasi Korban Bencana Gempa Cianjur

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the coordination between the Indonesian National Police (Polri) Disaster Victim Identification (DVI) Team and relevant agencies in identifying victims of the 2022 Cianjur earthquake, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Data were gathered through interviews, observation, and documentation. Seven informants were purposively selected, comprising leadership, coordinators, forensic doctors, and operational staff from the Polri DVI Team, Basarnas (National Search and Rescue Agency), the Cianjur Regency BPBD (Regional Disaster Management Agency), and victims' families. The analysis utilized Soewarno Handayaningrat's (2005) coordination theory—covering communication, awareness of coordination's importance, participant competence, commitment and incentives for coordination, and planning continuity—and Ansell and Gash's (2008) collaborative governance model, which encompasses initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaboration process. The results indicate that coordination between the Polri DVI Team and relevant agencies was reasonably effective based on the fulfillment of research indicators, though it was not yet fully optimal or institutionalized. Coordination was supported by clear task division, personnel competence, prior collaborative experience, shared humanitarian goals, professional commitment, leadership support, the presence of a DVI Post, hospital facilities, and the involvement of victims' families. Inhibiting factors included changing field conditions, damage to access routes and victim documentation, limited *ante-mortem* data, hierarchical communication structures, a lack of data integration across agencies, an uneven distribution of experts, and heavy personnel workloads. The study's conceptual findings reveal a pattern of inter-agency collaboration characterized by integrated coordination and centralized technical authority. Integrated coordination linked tasks, information, competence, and resources; the collaborative process fostered participation and trust; while the DVI Team's technical authority ensured the validity and accountability of identity determinations.*

***Keywords:*** *Inter-Agency Coordination, Collaborative Governance, National Police DVI Team, Disaster Victim Identification, Cianjur Earthquake*

**ARTICLE IDENTIFIERS**

**ORIGINAL ARTICLE**
**Vol. 9 No. 10, 2026**
**Pages 4933-4947**
**DOI: 10.56338/jks.v9i10.12184**

**ARTICLE HISTORY**

**Received:** 02 August 2026
**Revised:** 03 September 2026
**Accepted:** 17 October 2026

CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia rentan mengalami gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan berbagai bencana lainnya. Selain faktor geologis, iklim tropis dan tingginya curah hujan turut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa kejadian bencana di Indonesia masih didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Berdasarkan data jumlah kejadian bencana tahun 2015–2024, jumlah kejadian bencana di Indonesia mengalami perubahan setiap tahun dengan tingkat kejadian yang tetap tinggi. Pada 2022 tercatat lebih dari 3.500 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

Salah satu bagian penting dalam penanggulangan bencana adalah penanganan korban meninggal dunia. Pada bencana dengan jumlah korban yang besar, kondisi jenazah sering kali tidak memungkinkan untuk dikenali secara visual sehingga diperlukan proses identifikasi secara ilmiah. Identifikasi bertujuan mengetahui identitas korban, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi hak korban dan keluarganya. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri memiliki tugas penting dalam melakukan identifikasi korban bencana dan kecelakaan massal. Proses identifikasi menggunakan metode primer berupa pemeriksaan sidik jari, odontologi forensik, dan DNA serta metode sekunder, dengan mengacu pada standar Disaster Victim Identification INTERPOL yang mencakup pemeriksaan lokasi kejadian, post mortem, ante mortem, dan rekonsiliasi.

Salah satu bencana yang membutuhkan keterlibatan Tim DVI Polri adalah Gempa Cianjur pada 21 November 2022. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tersebut menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah dan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data BNPB hingga 12 Desember 2022, tercatat 335 korban meninggal dunia dan delapan orang masih dalam pencarian. Sementara itu, hasil pendataan ulang Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal mencapai sekitar 600 orang (Tim detikJabar, 2022). Perbedaan data tersebut terjadi karena sejumlah korban tidak tercatat dalam laporan awal dan telah dimakamkan langsung oleh keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan korban bencana tidak hanya menghadapi persoalan pencarian dan evakuasi, tetapi juga sinkronisasi data, pencatatan korban, dan kepastian identitas. Luasnya wilayah terdampak, perubahan data korban, serta banyaknya pihak yang terlibat semakin menegaskan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi yang terintegrasi dalam penanganan identifikasi korban.

Penanganan korban Gempa Cianjur melibatkan Tim DVI Polri, Pusdokkes Polri, Rumah Sakit Bhayangkara, Basarnas, BPBD Kabupaten Cianjur, pemerintah daerah, Disdukcapil, tenaga medis dan forensik, serta keluarga korban. Perbedaan tugas tersebut membentuk hubungan saling bergantung karena tidak ada satu instansi yang menguasai seluruh sumber daya dan informasi yang dibutuhkan dari tahap penemuan korban hingga penetapan identitas. Hubungan lintas instansi tersebut membutuhkan koordinasi untuk menyelaraskan pembagian tugas, pertukaran informasi, penggunaan sumber daya, dan pengambilan keputusan. Namun, koordinasi dalam situasi bencana menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan kondisi lapangan, banyaknya pihak yang terlibat, perbedaan sumber dan format data, keterlambatan penyampaian informasi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksinkronan data, keterlambatan pemeriksaan, tumpang tindih pekerjaan, dan terhambatnya pemberian kepastian identitas kepada keluarga korban.

Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Soewarno Handayaningrat sebagai kerangka analisis utama yang mencakup komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Model collaborative governance Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menganalisis ketergantungan antaraktor, aturan kelembagaan,

CC BY-SA 4.0

kepemimpinan fasilitatif, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Kedua perspektif tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memahami koordinasi lintas instansi dalam operasi identifikasi korban.

Penelitian mengenai koordinasi penanggulangan bencana telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara khusus menganalisis koordinasi Tim DVI Polri dengan instansi terkait dalam proses identifikasi korban bencana masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis koordinasi lintas instansi dalam penanganan identifikasi korban Gempa Cianjur Tahun 2022 dengan menempatkan Tim DVI Polri sebagai aktor utama dan menggunakan teori koordinasi serta collaborative governance secara saling melengkapi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis koordinasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dengan instansi terkait dalam penanganan identifikasi korban pada Gempa Cianjur Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat koordinasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena koordinasi dalam penanganan korban bencana oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri pada Gempa Cianjur Tahun 2022. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Tim DVI Polri, Pusdokkes Polri, Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, Basarnas, BPBD Kabupaten Cianjur serta keluarga korban terkait pelaksanaan koordinasi dalam penanganan korban Gempa Cianjur Tahun 2022, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme komunikasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan koordinasi antarunit. Dokumentasi diperoleh melalui laporan penanganan bencana, data kegiatan Tim DVI Polri, dokumen resmi, jurnal, buku, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan koordinasi dan penanganan korban bencana. Menurut Moleong (2018), informan dalam penelitian kualitatif dipilih secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan operasi DVI pada Gempa Cianjur Tahun 2022. Informan tersebut terdiri atas Kepala Bidang DVI, Koordinator DVI, Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, staf pelaksana Tim DVI Polri, perwakilan Basarnas, pejabat bidang kedaruratan BPBD, serta keluarga korban.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data dianalisis menggunakan teori koordinasi Soewarno Handayaningrat (2005) melalui lima dimensi, yaitu komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan, dan teori collaborative governance Ansell dan Gash (2008) melalui aspek kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Kedua teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola koordinasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika kolaborasi dalam penanganan identifikasi korban Gempa Cianjur Tahun 2022. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Identifikasi Korban Bencana pada Gempa Cianjur Tahun 2022 Berdasarkan Handayaningrat

### Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur penting dalam koordinasi karena menjadi sarana penyampaian informasi, perkembangan kegiatan, instruksi, dan kebutuhan antarinstansi. Menurut Soewarno Handayaningrat (2005),

CC BY-SA 4.0

komunikasi diperlukan untuk menyelaraskan tindakan agar pelaksanaan tugas yang berbeda tetap mengarah pada tujuan bersama. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022, komunikasi berlangsung sejak pencarian dan evakuasi, serah terima dan registrasi korban, pemeriksaan post mortem, pengumpulan data ante mortem, rekonsiliasi, penetapan identitas, hingga penyerahan jenazah kepada keluarga. Komunikasi tersebut melibatkan Tim DVI Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur, rumah sakit, Disdukcapil, Inafis, tenaga forensik, pemerintah daerah, dan keluarga korban.

Hubungan komunikasi tersebut menunjukkan adanya saling ketergantungan informasi. Basarnas menghasilkan informasi mengenai lokasi, waktu, kondisi penemuan, dan proses evakuasi korban yang menjadi dasar bagi Tim DVI untuk mendukung registrasi serta pemeriksaan. Tim post mortem menghasilkan data medis, odontologi, sidik jari, DNA, dan properti korban, sedangkan tim ante mortem mengumpulkan data korban semasa hidup dari keluarga, Disdukcapil, rumah sakit, dan sumber lainnya. Seluruh data kemudian dibandingkan dalam proses rekonsiliasi sebagai dasar penetapan identitas. Meskipun setiap instansi tetap menjalankan kewenangan dan kompetensinya, hasil satu instansi dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan instansi lainnya.

Komunikasi dalam operasi DVI berlangsung secara dua arah melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal meliputi posko, briefing, rapat koordinasi, formulir DVI, serah terima korban, rekonsiliasi, pelaporan, konferensi pers, dan evaluasi, sedangkan komunikasi langsung, telepon, radio komunikasi, dan grup WhatsApp digunakan untuk menyampaikan perkembangan serta menangani kebutuhan yang bersifat mendesak. Data yang diterima tidak langsung digunakan tanpa pemeriksaan, tetapi dikonfirmasi kepada sumber atau dibandingkan dengan data lainnya. Dengan demikian, komunikasi dalam proses identifikasi harus memenuhi unsur kecepatan sekaligus akurasi, validitas, keamanan, dan kerahasiaan data.

Keluarga korban juga memiliki kedudukan penting sebagai sumber data ante mortem dengan memberikan informasi mengenai identitas, ciri fisik, rekam medis, data gigi, foto, properti, dan hubungan biologis untuk kebutuhan DNA pembanding. Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 juga mencatat adanya koordinasi dengan Biddokkes Polda Jawa Barat, Polres Cianjur, BPBD, Basarnas, Disdukcapil, dan Inafis melalui kegiatan apel dan briefing, penyesuaian data pengiriman jenazah, pengumpulan data keluarga, pemeriksaan DNA, rekonsiliasi, konferensi pers, penyerahan jenazah, pelaporan, dan evaluasi. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi dilaksanakan sebagai bagian dari setiap tahapan operasi, bukan sekadar kegiatan insidental.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi tersebut turut mendukung capaian Operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022. Tim DVI menerima 176 kantong jenazah, menerima 121 laporan orang hilang, dan berhasil mengidentifikasi 163 jenazah, sementara 10 objek belum teridentifikasi yang terdiri atas tiga jenazah utuh dan tujuh bagian tubuh. Capaian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi telah mendukung kesinambungan penanganan sejak evakuasi sampai penetapan identitas. Namun, angka capaian tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran efektivitas komunikasi karena keberhasilan identifikasi juga dipengaruhi kondisi jenazah, ketersediaan data pembanding, kompetensi personel, dan metode pemeriksaan.

Meskipun telah mendukung pelaksanaan operasi, komunikasi belum sepenuhnya optimal. Pola komunikasi yang masih berjenjang menyebabkan informasi tertentu tidak selalu diterima secara cepat dan merata. Banyaknya aktor, perubahan kondisi lapangan, serta perbedaan waktu dan bentuk penyampaian data juga mengharuskan petugas melakukan sinkronisasi ulang. Kerusakan rumah dan akses jalan turut menyulitkan keluarga menyediakan data ante mortem, seperti dokumen kependudukan dan foto korban semasa hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi tidak semata-mata disebabkan oleh hubungan antarinstansi, tetapi juga oleh rusaknya sumber data dan terbatasnya akses keluarga akibat bencana.

Berdasarkan keseluruhan analisis, komunikasi antara Tim DVI Polri dan instansi terkait dalam penanganan identifikasi korban Gempa Cianjur dapat dinilai telah berjalan cukup efektif. Komunikasi mampu menghubungkan setiap tahapan identifikasi, menyelaraskan pembagian tugas, membangun kesamaan informasi, dan mendukung penetapan identitas berdasarkan bukti. Temuan tersebut sesuai dengan teori Soewarno Handayaningrat (2005) bahwa komunikasi menjadi sarana untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam koordinasi. Namun, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal pada aspek kecepatan,

CC BY-SA 4.0

pemerataan, kelengkapan, dan integrasi data sehingga diperlukan penguatan standardisasi format informasi antarinstansi, saluran komunikasi bersama, pencatatan dan perlindungan data, serta mekanisme untuk menjangkau keluarga yang mengalami hambatan akses.

### Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi merupakan pemahaman setiap pihak bahwa pencapaian tujuan bersama tidak hanya bergantung pada penyelesaian tugas masing-masing, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan dan menyesuaikan pekerjaan dengan pihak lain. Menurut Soewarno Handayaningrat (2005), koordinasi dapat berjalan efektif apabila setiap unsur menyadari adanya saling ketergantungan, memahami kedudukan dan tanggung jawabnya, serta bersedia menyelaraskan tindakan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, instansi yang terlibat dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022 telah menyadari bahwa identifikasi korban tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi. Kesadaran tersebut terbentuk karena setiap tahapan membutuhkan kewenangan, sumber daya, informasi, dan kompetensi yang berbeda. Hubungan saling ketergantungan terlihat sejak korban ditemukan hingga diserahkan kepada keluarga. Informasi dari Basarnas diperlukan oleh Tim DVI untuk penerimaan, registrasi, dan pemeriksaan, sedangkan hasil pemeriksaan post mortem membutuhkan data pembanding ante mortem dari keluarga, Disdukcapil, rumah sakit, dan sumber terkait. Data tersebut kemudian dipertemukan dalam rekonsiliasi. Artinya, hasil pekerjaan satu pihak tidak dapat digunakan secara optimal tanpa kontribusi pihak lain.

Kesadaran koordinasi juga diwujudkan melalui kepatuhan terhadap pembagian kewenangan. Setiap instansi menjalankan tugas berdasarkan fungsi dan kompetensinya tanpa mengambil alih kewenangan pihak lain. Batas kewenangan tersebut tidak menghentikan pertukaran informasi karena setiap instansi tetap terhubung melalui posko dan forum koordinasi. Kondisi tersebut sesuai dengan teori Soewarno Handayaningrat (2005), bahwa kesadaran akan koordinasi diwujudkan melalui kepatuhan pada pembagian tugas, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap kompetensi pihak lain, kesediaan memberikan dukungan, dan pelaksanaan keputusan hasil koordinasi.

Temuan tersebut diperkuat oleh Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 yang mencatat adanya dasar formal pelibatan personel, koordinasi dengan berbagai instansi, serta pembentukan Pos DVI dan Pos Ante Mortem di RSUD Sayang dan RSUD Cimacan. Pelibatan berbagai instansi dan pembentukan pos tersebut menunjukkan adanya pengakuan kelembagaan bahwa penanganan korban membutuhkan keterhubungan antara unsur pencarian, pemeriksaan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah. Kesadaran terhadap peran keluarga juga terlihat dari pembentukan Pos Ante Mortem karena keluarga menjadi sumber data penting untuk mendukung proses identifikasi.

Kesadaran koordinasi diperkuat oleh kesamaan tujuan kemanusiaan, yaitu memastikan korban dapat diidentifikasi secara tepat, mencegah kesalahan identitas, dan memberikan kepastian kepada keluarga. Selain itu, kesadaran tersebut dibangun dan dipelihara melalui briefing, pengarahan, pelatihan, simulasi, evaluasi, dan pengalaman operasi sebelumnya. Dalam proses rekonsiliasi, setiap pihak menyadari bahwa data yang dimilikinya hanya menjadi satu bagian dari keseluruhan pembuktian sehingga data ante mortem dan post mortem harus dibandingkan sebelum identitas ditetapkan.

Meskipun kesadaran koordinasi telah terbentuk dengan baik, pemahaman teknis belum sepenuhnya merata. Perbedaan pengalaman personel, perubahan anggota tim, kondisi lapangan, kelengkapan data, serta perbedaan sumber, bentuk, dan waktu penerimaan data menyebabkan proses sinkronisasi masih memerlukan waktu. Kerusakan rumah dan akses jalan juga menyulitkan keluarga menyediakan dokumen kependudukan, foto korban semasa hidup, dan data pembanding lainnya. Dengan demikian, hambatan yang muncul bukan terutama rendahnya kemauan bekerja sama, melainkan kemampuan menerjemahkan kesadaran tersebut ke dalam mekanisme kerja yang cepat dan terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian Mujiadi (2019), koordinasi horizontal di Samsat Pangandaran terhambat oleh kurangnya kerja sama dan pemahaman pegawai terhadap tugas serta kewenangan masing-masing, sedangkan dalam operasi DVI Gempa Cianjur kemauan bekerja sama dan pemahaman terhadap fungsi utama

CC BY-SA 4.0

setiap instansi relatif telah terbentuk. Hambatan lebih banyak berkaitan dengan pemerataan pemahaman teknis, perubahan personel, kondisi lapangan, kelengkapan data, dan sistem pertukaran informasi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022 telah terbentuk dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui pemahaman terhadap ketergantungan tugas, kepatuhan pada pembagian kewenangan, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap kompetensi, kesediaan membantu pihak lain, dan pelaksanaan hasil koordinasi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan pengalaman personel, perubahan anggota tim, keterbatasan data ante mortem, serta belum terintegrasinya informasi. Oleh karena itu, penguatan diperlukan melalui briefing berkelanjutan, pelatihan dan simulasi lintas instansi, evaluasi bersama, penetapan petugas penghubung, standardisasi pertukaran informasi, serta pengembangan pelayanan ante mortem bergerak.

## Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan koordinasi. Menurut Soewarno Handayaningrat (2005), pihak yang terlibat dalam koordinasi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kemampuan melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya. Dalam operasi Disaster Victim Identification (DVI), kompetensi memiliki kedudukan penting karena identifikasi korban membutuhkan ketelitian ilmiah, kepatuhan terhadap prosedur, dokumentasi yang dapat ditelusuri, serta integrasi berbagai bidang keahlian.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi partisipan dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022 secara umum telah memadai. Personel ditempatkan berdasarkan keahlian, pendidikan, pengalaman, dan kebutuhan operasi. Pembagian tersebut memperlihatkan kompetensi kelembagaan, yaitu kemampuan dan kewenangan setiap instansi sesuai tugasnya, serta kompetensi individual, yaitu pengetahuan dan keterampilan personel dalam menjalankan fungsi teknis tertentu. Pada tahap post mortem, pemeriksaan dilakukan oleh tenaga profesional yang menghasilkan data medis, odontologi, sidik jari, dan DNA, sedangkan tim ante mortem menghimpun identitas, ciri korban, dokumen kependudukan, riwayat medis dan gigi, serta data DNA pembanding dari keluarga. Seluruh data tersebut kemudian dibandingkan dalam proses rekonsiliasi untuk memastikan penetapan identitas tidak dilakukan berdasarkan dugaan.

Temuan penelitian diperkuat oleh Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 yang mencatat pembagian personel ke dalam fungsi penanggung jawab, dokter, tenaga medis, petugas ante mortem, petugas post mortem, administrasi, serta unsur pendukung. Pembentukan Pos DVI dan Pos Ante Mortem di RSUD Sayang dan RSUD Cimacan juga memperjelas lokasi kerja, tanggung jawab, serta hubungan antarbagian selama operasi. Kompetensi personel didukung oleh pendidikan, pelatihan, simulasi, pembinaan, pedoman teknis, dan pengalaman operasi sebelumnya. Selain kemampuan teknis, personel membutuhkan kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim lintas instansi, menggunakan jalur pelaporan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

Kesesuaian kompetensi dengan pembagian tugas turut mendukung capaian operasi. Laporan akhir mencatat bahwa 163 jenazah berhasil diidentifikasi. Namun, capaian tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan kemampuan Tim DVI karena identifikasi juga bergantung pada hasil evakuasi, kondisi jenazah, ketersediaan data ante mortem, dukungan fasilitas, dan kontribusi instansi lain. Data capaian lebih tepat dipahami sebagai hasil penggunaan kompetensi yang saling melengkapi dalam satu proses koordinasi.

Meskipun kompetensi personel secara umum memadai, ketersediaannya belum merata pada tingkat kewilayahan. Bencana berskala besar masih membutuhkan mobilisasi dokter forensik, tenaga DNA, odontologi forensik, operator data, dan personel DVI terlatih dari tingkat pusat atau daerah lain. Keterbatasan juga terlihat pada pengumpulan data ante mortem karena kerusakan rumah, hilangnya dokumen, terputusnya akses jalan, dan kesulitan memperoleh sampel pembanding mengharuskan personel menyesuaikan metode kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya diukur dari penguasaan prosedur dalam kondisi normal, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi tanpa mengurangi akurasi dan standar pembuktian.

CC BY-SA 4.0

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rio Surya Pratama (2019) yang menemukan bahwa ketidakmerataan sumber daya manusia dapat menghambat koordinasi antarlembaga. Persamaannya terletak pada pentingnya pemerataan kemampuan dan dukungan personel. Temuan ini juga mendukung kajian Gunawan Widjaja dkk. (2025) yang menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu strategi memperkuat koordinasi antarinstansi. Dalam operasi DVI, kapasitas tidak hanya berhubungan dengan jumlah personel, tetapi juga mencakup spesialisasi keahlian, persebaran tenaga ahli, kesiapan mobilisasi, kemampuan pengelolaan data, dan komunikasi kepada keluarga korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kompetensi partisipan telah mendukung koordinasi dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022. Penempatan personel berdasarkan keahlian, keterlibatan tenaga profesional, pembagian fungsi yang jelas, serta pengalaman operasi membantu menjaga ketelitian dan kesinambungan proses identifikasi. Temuan tersebut sesuai dengan teori Soewarno Handayaningrat (2005), karena setiap pihak memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Namun, kompetensi tersebut belum sepenuhnya optimal dari aspek jumlah, pemerataan, dan kesiapan pada tingkat kewilayahan sehingga masih diperlukan penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan simulasi lintas instansi, standardisasi kemampuan personel, pemetaan tenaga ahli DVI, mekanisme mobilisasi personel, pengembangan tim ante mortem bergerak, serta peningkatan kemampuan pengelolaan data.

### Komitmen dan insentif koordinasi

Komitmen dan insentif koordinasi merupakan unsur yang menjaga keterlibatan setiap partisipan selama pelaksanaan kegiatan bersama. Dalam kerangka koordinasi Soewarno Handayaningrat (2005), komitmen tercermin melalui kesediaan setiap pihak menaati pembagian tugas, melaksanakan hasil kesepakatan, dan mempertahankan kerja sama sampai tujuan tercapai. Insentif koordinasi tidak hanya berbentuk imbalan material, tetapi juga dapat berupa dukungan organisasi, fasilitas kerja, perlindungan personel, pengakuan profesional, dan manfaat yang diperoleh dari keberhasilan tugas bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen partisipan dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022 tergolong kuat. Komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan berbagai instansi sejak pencarian dan evakuasi hingga identifikasi serta penyerahan jenazah kepada keluarga. Para pelaksana tetap menjalankan tugas dalam situasi darurat yang ditandai oleh tekanan waktu, beban kerja tinggi, kondisi jenazah yang beragam, wilayah terdampak yang tersebar, serta keterbatasan akses dan data korban. Komitmen tersebut terutama didorong oleh tanggung jawab profesional, kewajiban kelembagaan, dan tujuan kemanusiaan untuk memberikan kepastian identitas kepada keluarga.

Komitmen koordinasi terlihat melalui kepatuhan terhadap pembagian tugas, kesediaan berbagi informasi, dan menindaklanjuti hasil koordinasi. Informasi penemuan korban dari Basarnas diteruskan kepada Tim DVI, kebutuhan data ante mortem disampaikan kepada keluarga dan instansi terkait, sedangkan ketidaksesuaian data dibahas melalui pemeriksaan ulang dan rekonsiliasi. Hasil rekonsiliasi kemudian menjadi dasar penetapan identitas serta penyerahan jenazah kepada keluarga. Temuan tersebut diperkuat oleh Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 yang mencatat bahwa operasi berlangsung sejak 21 November sampai dengan 20 Desember 2022. Dalam periode tersebut, Tim DVI menerima 176 kantong jenazah, menangani 121 laporan orang hilang, dan berhasil mengidentifikasi 163 jenazah. Lamanya operasi dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya konsistensi keterlibatan personel dan instansi terkait.

Selain tujuan kemanusiaan, terdapat insentif profesional dan organisasional berupa kepercayaan pimpinan, kesempatan menggunakan keahlian, pengakuan terhadap kompetensi, pengalaman operasi, dan keberhasilan menyelesaikan tugas. Dukungan organisasi juga berfungsi sebagai insentif yang mempertahankan komitmen melalui penugasan personel, pembentukan Pos DVI dan Pos Ante Mortem, penyediaan fasilitas rumah sakit, ambulans, peralatan pemeriksaan, konsumsi, alat pelindung diri, pelayanan kesehatan, waktu istirahat, dan rotasi personel. Berdasarkan data penelitian, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa

CC BY-SA 4.0

insentif finansial khusus menjadi pendorong utama koordinasi. Temuan justru menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional, kewajiban institusional, solidaritas, tujuan kemanusiaan, dan dukungan organisasi lebih dominan dalam mempertahankan partisipasi.

Hubungan antara komitmen dan insentif bersifat timbal balik. Komitmen mendorong personel untuk tetap menjalankan tugas, sedangkan dukungan organisasi menjaga agar komitmen tidak melemah akibat beban operasi. Meskipun komitmen para aktor kuat, operasi yang berlangsung cukup lama berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis. Beban pemeriksaan, tekanan waktu, tuntutan keluarga, keterbatasan data ante mortem, dan kondisi jenazah dapat memengaruhi konsentrasi serta daya tahan personel. Selain itu, perbedaan kapasitas organisasi dapat memengaruhi bentuk dukungan yang diterima personel sehingga diperlukan dukungan yang disesuaikan berdasarkan beban dan kebutuhan setiap bagian.

Temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian Mujiadi (2019), yang menemukan bahwa lemahnya kerja sama, perasaan saling membantu, dan semangat tim menjadi hambatan koordinasi horizontal di Samsat Pangandaran. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur, komitmen dan semangat kerja sama relatif lebih kuat karena didorong oleh situasi darurat, kewajiban kelembagaan, ketergantungan tugas, dan tujuan kemanusiaan yang jelas. Temuan penelitian juga mendukung kajian Gunawan Widjaja dkk. (2025), yang menekankan pentingnya sumber daya dan dukungan organisasi dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga.

Dalam perspektif Soewarno Handayaningrat (2005), komitmen koordinasi telah terbentuk melalui kesediaan partisipan menaati pembagian tugas, berbagi informasi, melaksanakan hasil koordinasi, dan mempertahankan keterlibatan sampai operasi selesai. Insentif koordinasi berfungsi menjaga partisipasi tersebut melalui dukungan fasilitas, perlindungan personel, pengakuan profesional, dan kebermaknaan tujuan kemanusiaan. Berdasarkan keseluruhan analisis, indikator komitmen dan insentif koordinasi dapat dinilai telah terpenuhi dengan baik, tetapi dukungan organisasionalnya masih perlu diperkuat, terutama untuk mengatasi kelelahan personel, tingginya beban kerja, tekanan psikologis, dan keterbatasan dukungan di wilayah. Penguatan perlu dilakukan melalui sistem rotasi berdasarkan beban kerja, dukungan kesehatan fisik dan psikologis, kepastian logistik, perlindungan keselamatan, pengakuan kinerja, dan evaluasi kondisi personel selama operasi.

### Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan merupakan unsur yang memastikan koordinasi tidak berhenti pada penyusunan rencana dan pembagian tugas awal, tetapi terus berlangsung selama kegiatan dilaksanakan. Menurut Soewarno Handayaningrat (2005), rencana harus dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022, kontinuitas perencanaan menjadi penting karena jumlah korban yang ditemukan, kondisi jenazah, laporan orang hilang, ketersediaan data ante mortem, akses menuju lokasi, dan kebutuhan pemeriksaan tidak dapat dipastikan sepenuhnya pada awal operasi. Oleh karena itu, rencana operasi tidak diterapkan secara kaku, tetapi diperbarui berdasarkan perkembangan informasi dan kebutuhan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, kontinuitas perencanaan dilaksanakan melalui briefing, rapat koordinasi, pembaruan informasi, evaluasi harian, dan penyusunan laporan. Perencanaan dimulai melalui penentuan lokasi Pos DVI dan Pos Ante Mortem, pembagian personel, penyiapan fasilitas pemeriksaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Apabila terjadi perubahan situasi, koordinator menyesuaikan penempatan personel, prioritas pekerjaan, kebutuhan pemeriksaan, dan hubungan antarbagian. Evaluasi harian menjadi penghubung antara pelaksanaan dan perencanaan berikutnya, sehingga kendala yang ditemukan selama pemeriksaan dapat dibahas untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan tindakan yang harus dilakukan.

Kontinuitas perencanaan juga terlihat dalam penanganan kendala data ante mortem. Kerusakan rumah dan akses jalan menyebabkan dokumen pribadi, foto korban, dan data pembanding lainnya sulit diperoleh. Situasi tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan keluarga, Disdukcapil, kepolisian, rumah sakit, dan pihak terkait. Sampel DNA keluarga juga digunakan apabila data medis, odontologis, sidik jari, atau dokumen kependudukan belum mencukupi. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan bersifat adaptif, tetapi tetap mempertahankan standar pembuktian identitas.

CC BY-SA 4.0

Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 memperkuat temuan tersebut. Operasi berlangsung sejak 21 November sampai dengan 20 Desember 2022. Selama periode itu, Tim DVI menerima 176 kantong jenazah dari Basarnas, menangani 121 laporan orang hilang, dan mengidentifikasi 163 jenazah. Perubahan data sepanjang operasi mengharuskan rencana terus diperbarui karena perkembangan pada satu tahapan memengaruhi kebutuhan tahapan lainnya. Evaluasi akhir juga digunakan untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, mendokumentasikan pengalaman, dan menyusun rekomendasi bagi kesiapan operasi berikutnya.

Dalam perspektif Soewarno Handayaningrat (2005), temuan tersebut menunjukkan bahwa kontinuitas perencanaan telah berjalan melalui hubungan antara rencana awal, pelaksanaan, evaluasi, tindakan korektif, dan pembelajaran organisasi. Namun, pembaruan rencana belum sepenuhnya didukung oleh sistem data lintas instansi yang terintegrasi. Sebagian informasi masih disampaikan melalui jalur berjenjang dan media komunikasi yang berbeda. Selain itu, jumlah personel terlatih dan ketersediaan data ante mortem pada tingkat kewilayahan belum merata. Kontinuitas juga harus mencakup penanganan terhadap jenazah atau bagian tubuh yang belum teridentifikasi setelah operasi lapangan berakhir. Laporan akhir mencatat masih terdapat 10 objek yang belum teridentifikasi, terdiri atas tiga jenazah utuh dan tujuh bagian tubuh. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai penanggung jawab pascaoperasi, penyimpanan data dan sampel, pengamanan informasi, mekanisme pemeriksaan lanjutan, serta komunikasi kepada keluarga.

Berdasarkan keseluruhan analisis, indikator kontinuitas perencanaan dapat dinilai telah terpenuhi, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kekuatan utamanya terdapat pada perencanaan awal, briefing, evaluasi harian, pembaruan data, penyesuaian pembagian tugas, evaluasi akhir, serta penyusunan laporan dan rekomendasi. Kelemahannya meliputi belum terintegrasinya data antarinstansi, komunikasi yang masih berjenjang, ketidakmerataan personel terlatih, keterbatasan data ante mortem, dan belum terperincinya tindak lanjut terhadap objek yang belum teridentifikasi. Penguatan perlu dilakukan melalui standardisasi data, sistem pertukaran informasi yang aman, peningkatan kapasitas personel kewilayahan, pembentukan tim ante mortem bergerak, pembangunan basis data ante mortem, serta mekanisme pascaoperasi bagi korban yang belum teridentifikasi.

## Collaborative Governance Berdasarkan Ansell & Gash

### Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan faktor yang memengaruhi terbentuknya proses collaborative governance. Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal mencakup tiga aspek utama, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan; insentif para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi; serta riwayat kerja sama atau konflik sebelumnya. Ketiga aspek tersebut memengaruhi posisi aktor, tingkat kepercayaan, dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antaraktor dalam kewenangan, sumber daya, dan pengetahuan, tetapi perbedaan tersebut lebih bersifat fungsional daripada menunjukkan dominasi. Tim DVI memiliki kewenangan dan kompetensi teknis identifikasi, Basarnas memiliki kemampuan pencarian dan evakuasi, BPBD dan pemerintah daerah memiliki informasi wilayah serta dukungan kedaruratan, rumah sakit menyediakan fasilitas pemeriksaan, sedangkan Disdukcapil dan Inafis mendukung data kependudukan dan sidik jari. Keluarga memiliki informasi personal korban yang diperlukan dalam data ante mortem. Meskipun keputusan teknis berada pada tenaga profesional, proses identifikasi tetap bergantung pada kontribusi aktor lain.

Ketidakseimbangan sumber daya juga terlihat antara tingkat pusat dan daerah. Pusdokkes Polri dan Tim DVI memiliki tenaga ahli serta pengalaman operasi yang lebih besar, sedangkan unsur kewilayahan memiliki pengetahuan lokasi, fasilitas, jaringan lokal, dan hubungan dengan masyarakat. Bencana berskala besar masih memerlukan mobilisasi tenaga ahli dari pusat atau daerah lain. Namun, perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi dominasi karena Tim DVI tetap membutuhkan kontribusi Basarnas, rumah sakit, Disdukcapil, Inafis, BPBD, dan keluarga.

CC BY-SA 4.0

Menurut Ansell dan Gash (2008), insentif partisipasi menjadi kuat ketika tujuan tidak dapat dicapai secara mandiri dan kolaborasi memberikan hasil yang bernilai. Dalam operasi DVI, insentif tersebut berasal dari mandat kelembagaan, tanggung jawab profesional, hubungan saling bergantung, dan tujuan kemanusiaan. Insentif tidak terutama berupa keuntungan material, tetapi berupa terselesaikannya mandat kelembagaan, tersedianya informasi, meningkatnya akuntabilitas, serta tercapainya kepastian identitas dan penyerahan jenazah kepada keluarga.

Kondisi awal juga dipengaruhi riwayat kerja sama antarinstansi. Tim DVI Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, rumah sakit, dan kepolisian kewilayahan sebelumnya telah terlibat dalam pelatihan, simulasi, penanganan keadaan darurat, atau operasi kebencanaan lainnya. Pengalaman tersebut membantu memahami tugas dasar dan mempercepat pembentukan hubungan kerja. Penelitian tidak menemukan konflik kelembagaan terbuka yang menghambat identifikasi. Perbedaan yang muncul berkaitan dengan alur kerja, waktu penyampaian informasi, pemahaman teknis, perubahan kebutuhan, dan keterbatasan sumber daya, yang ditangani melalui briefing, rapat koordinasi, komunikasi langsung, pemeriksaan ulang, dan penegasan pembagian tugas.

Hubungan saling ketergantungan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu aktor yang menguasai seluruh kewenangan, sumber daya, informasi, dan kemampuan yang diperlukan. Tim DVI menjadi pelaksana utama identifikasi, tetapi membutuhkan Basarnas dalam evakuasi, BPBD dan pemerintah daerah dalam dukungan wilayah, rumah sakit dalam fasilitas pemeriksaan, Disdukcapil serta Inafis dalam verifikasi data, dan keluarga sebagai sumber data ante mortem. Hubungan tersebut menjadi dasar kolaborasi.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Pratiwi Nasyanti (2023) mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang menunjukkan lemahnya koordinasi antara tingkat pemerintahan dan kuatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur, ketergantungan pusat dan daerah tetap ditemukan terutama dalam ketersediaan tenaga ahli, tetapi unsur daerah tidak hanya menjadi pelaksana pasif karena memiliki informasi wilayah, fasilitas, jaringan lokal, dan hubungan dengan masyarakat yang dibutuhkan Tim DVI. Temuan ini juga mendukung Gunawan Widjaja dkk. (2025), yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan perbedaan kapasitas dapat menghambat koordinasi antarlembaga. Dalam operasi DVI, perbedaan kapasitas tidak selalu menjadi hambatan apabila terdapat ketergantungan yang diakui, pembagian kontribusi yang jelas, dan insentif untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), kondisi awal operasi DVI Gempa Cianjur telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi terbentuknya kolaborasi. Kondisi darurat menciptakan ketergantungan, tujuan kemanusiaan dan mandat kelembagaan memberikan insentif partisipasi, sedangkan pengalaman kerja sama membangun kepercayaan awal. Namun, kondisi awal belum sepenuhnya setara karena masih terdapat ketidakseimbangan tenaga ahli, fasilitas, akses informasi, dan kapasitas antara pusat dan daerah. Keluarga juga berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam memahami proses dan memperoleh informasi. Dengan demikian, kondisi awal dapat dinilai telah mendukung terbentuknya kolaborasi, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kekuatan utamanya terletak pada ketergantungan antaraktor, insentif partisipasi, dan pengalaman kerja sama, sedangkan kelemahannya terdapat pada ketidakmerataan kapasitas, tenaga ahli, fasilitas, dan akses informasi. Penguatan diperlukan melalui pemetaan sumber daya sebelum bencana, pemerataan kapasitas DVI di tingkat kewilayahan, pelatihan lintas instansi, sistem berbagi informasi sejak aktivasi operasi, mekanisme mobilisasi tenaga ahli, serta pelayanan keluarga yang lebih jelas dan empatik..

### Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan aturan, struktur, prosedur, dan mekanisme yang mengatur keterlibatan para pemangku kepentingan dalam collaborative governance. Menurut Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan mencakup partisipasi yang inklusif, eksklusivitas forum kolaborasi, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022, desain kelembagaan dibentuk melalui dasar penugasan, struktur operasi, pembagian tugas, tahapan identifikasi, Pos DVI, Pos Ante Mortem, serta mekanisme

CC BY-SA 4.0

koordinasi dan pertukaran informasi. Pelaksanaan operasi memadukan struktur komando internal dan kolaborasi lintas instansi karena Tim DVI tidak memiliki kewenangan atas seluruh instansi yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam operasi DVI melibatkan aktor yang memiliki fungsi berbeda, seperti Basarnas dalam pencarian dan evakuasi, BPBD dan pemerintah daerah dalam dukungan kedaruratan serta informasi wilayah, Polres Cianjur dalam pengamanan, rumah sakit dalam penyediaan fasilitas pemeriksaan dan penyimpanan jenazah, serta Disdukcapil dan Inafis dalam verifikasi data. Tenaga forensik, DNA, odontologi, dan sidik jari berkontribusi dalam pemeriksaan ilmiah, sedangkan keluarga korban menyediakan data ante mortem dan sampel pembanding. Pelibatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya dibatasi pada lingkungan internal kepolisian. Namun, akses informasi keluarga masih perlu diperkuat karena keluarga belum selalu mengetahui struktur pelayanan dan pihak yang harus dihubungi.

Forum kolaborasi dalam operasi DVI diwujudkan melalui Pos DVI, Pos Ante Mortem, briefing, rapat koordinasi, evaluasi, dan rekonsiliasi. Pos DVI berfungsi sebagai pusat pengendalian kegiatan identifikasi dan konsolidasi informasi operasional, sedangkan forum lainnya memiliki fungsi sesuai tahapan kegiatan. Briefing membahas perkembangan dan pembagian pekerjaan, rapat koordinasi menghubungkan kebutuhan antarinstansi, evaluasi digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan, dan rekonsiliasi menjadi forum profesional untuk membandingkan data ante mortem dan post mortem sebelum identitas ditetapkan. Namun, setiap instansi tetap memiliki jalur komando dan pelaporan internal sehingga informasi masih dapat disampaikan secara berulang atau terlambat diterima oleh pihak lain.

Aturan dasar dalam operasi DVI telah mengatur pembagian kerja berdasarkan fungsi kelembagaan dan tahapan DVI. Pencarian serta evakuasi berada pada Basarnas dan unsur lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, registrasi, pemeriksaan post mortem, pengumpulan data ante mortem, rekonsiliasi, penetapan identitas, dan penyerahan jenazah kepada keluarga. Penetapan identitas dilakukan berdasarkan perbandingan data ante mortem dan post mortem. Apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan klarifikasi, pengumpulan informasi tambahan, atau pemeriksaan pendukung. Dengan demikian, keputusan identifikasi tidak ditetapkan secara sepihak atau berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan bukti dan kompetensi tenaga ahli. Meskipun demikian, aturan teknis lintas instansi mengenai pertukaran data, format informasi, otoritas validasi, hak akses, perlindungan data, dan tindak lanjut terhadap objek yang belum teridentifikasi masih perlu diperkuat.

Transparansi proses dilaksanakan melalui briefing, rapat koordinasi, pembaruan data, dokumentasi pemeriksaan, rekonsiliasi, evaluasi, pelayanan kepada keluarga, pemberitahuan hasil identifikasi, konferensi pers, dan laporan operasi. Transparansi tetap mempertimbangkan validitas hasil, kerahasiaan data pribadi, perlindungan keluarga, dan kewenangan pihak yang menyampaikan informasi. Petugas tidak memberikan kepastian identitas sebelum pemeriksaan selesai karena informasi yang diberikan harus akurat dan tidak menimbulkan kesalahan identifikasi. Laporan akhir operasi juga menjadi bentuk akuntabilitas karena memuat periode dan kegiatan operasi, susunan personel, capaian identifikasi, kendala, dan rekomendasi.

Desain kelembagaan telah menyediakan dasar bagi berlangsungnya kolaborasi melalui struktur, pembagian peran, forum koordinasi, prosedur pemeriksaan, dan dokumentasi. Namun, desain tersebut masih relatif berpusat pada struktur operasional Tim DVI. Temuan penelitian sejalan dengan Gunawan Widjaja dan Handojo Dhanudibroto (2025), yang menyatakan bahwa koordinasi antarlembaga dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas, regulasi yang harmonis, komunikasi, dan integrasi data. Temuan ini juga mendukung Neisya Al Mandita dan Resa Aprilia (2024), yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang terbuka dan inklusif dalam kolaborasi. Dalam operasi DVI, inklusivitas tetap harus mempertimbangkan kompetensi, kewenangan, dan kerahasiaan data.

Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan operasi DVI Gempa Cianjur telah memenuhi unsur partisipasi inklusif, forum kolaborasi, aturan dasar, dan transparansi. Akan tetapi, pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Partisipasi telah melibatkan aktor yang relevan, Pos DVI telah menjadi pusat koordinasi teknis, dan aturan kerja telah tersedia, tetapi sistem pertukaran data belum sepenuhnya terintegrasi serta akses informasi keluarga masih perlu diperkuat. Dengan demikian, indikator desain kelembagaan dapat dinilai

CC BY-SA 4.0

telah terpenuhi secara operasional, tetapi masih perlu diperkuat secara kolaboratif melalui pedoman lintas instansi, format data bersama, penetapan otoritas validasi, petugas penghubung, perlindungan data pribadi, mekanisme pelayanan keluarga, dan evaluasi bersama setelah operasi.

### Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu unsur penting dalam model collaborative governance Ansell dan Gash (2008). Kepemimpinan ini berfungsi mempertemukan para pemangku kepentingan, menjaga partisipasi, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, mengelola perbedaan, dan mengarahkan kolaborasi menuju tujuan bersama. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022, kepemimpinan dijalankan melalui struktur operasi yang menempatkan pimpinan dan koordinator DVI sebagai pengarah kegiatan identifikasi. Kepemimpinan tersebut memiliki dua fungsi yang berjalan bersamaan, yaitu fungsi komando secara internal dan fungsi fasilitasi dalam hubungan lintas instansi. Fungsi komando diperlukan untuk memastikan personel Tim DVI menaati pembagian tugas, prosedur pemeriksaan, dan jalur pelaporan, sedangkan fungsi fasilitasi diperlukan karena Tim DVI tidak mempunyai garis komando langsung terhadap Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, rumah sakit, Disdukcapil, Inafis, dan keluarga korban. Oleh karena itu, hubungan dengan aktor tersebut dibangun melalui koordinasi, komunikasi, dan kesepahaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan operasi berperan menetapkan tujuan, membagi tugas, menempatkan personel berdasarkan kompetensi, memantau perkembangan, memfasilitasi kebutuhan teknis, dan menentukan tindak lanjut berdasarkan kondisi lapangan melalui briefing, rapat koordinasi, komunikasi langsung, evaluasi, dan Pos DVI. Pimpinan tidak hanya mempertemukan aktor dalam rapat, tetapi juga menghubungkan hasil pekerjaan mereka. Informasi penemuan korban diteruskan kepada Tim DVI, data keluarga dan kependudukan diterima oleh tim ante mortem, sedangkan hasil pemeriksaan seluruh bagian dipertemukan dalam rekonsiliasi. Dengan demikian, pimpinan memfasilitasi hubungan antaraktor sekaligus mengintegrasikan kontribusinya. Tujuan bersama diarahkan untuk memastikan korban diidentifikasi secara cepat, akurat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan serta diserahkan kepada keluarga secara tepat. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi dan kompetensi, sedangkan keputusan teknis identifikasi tetap didasarkan pada kecocokan data ante mortem dan post mortem serta bukti ilmiah yang memadai.

Kepemimpinan juga terlihat dalam memfasilitasi komunikasi dan sumber daya. Perubahan jumlah korban, kekurangan data ante mortem, kebutuhan tenaga ahli, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan informasi dibahas melalui briefing serta rapat koordinasi. Pimpinan berperan menentukan prioritas, menunjuk pihak yang menindaklanjuti, dan menghubungkan kebutuhan dengan aktor yang mempunyai sumber daya. Pos DVI berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan informasi dan kebutuhan, sehingga setiap pihak dapat mempersiapkan dan menyesuaikan tugasnya. Laporan Akhir Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 juga memuat susunan penanggung jawab, ketua, wakil ketua, dan personel berdasarkan fungsi yang menunjukkan adanya garis tanggung jawab dan pengendalian kegiatan sejak aktivasi operasi sampai evaluasi serta pelaporan akhir. Dalam mengelola perbedaan, penelitian tidak menemukan konflik terbuka yang menghambat operasi. Perbedaan lebih banyak berkaitan dengan alur komunikasi, waktu penyampaian data, pembagian tugas, dan kebutuhan sumber daya. Perbedaan tersebut dikelola melalui komunikasi langsung, briefing, pemeriksaan ulang, penegasan tanggung jawab, dan penyesuaian pekerjaan. Apabila data ante mortem tidak sesuai dengan hasil post mortem, pimpinan memfasilitasi klarifikasi, pengumpulan data tambahan, pemeriksaan pendukung, dan pembahasan melalui rekonsiliasi. Kepercayaan antaraktor dibangun melalui konsistensi arahan, keterbukaan informasi operasional, penghargaan terhadap kompetensi, dan kepastian bahwa setiap data diproses secara benar. Namun, akses keluarga terhadap perkembangan informasi belum selalu setara dengan akses instansi sehingga fungsi kepemimpinan dalam memberdayakan partisipan yang lebih lemah masih perlu diperkuat melalui layanan informasi keluarga yang terpusat.

Jika ditinjau secara kritis berdasarkan Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan dalam operasi DVI masih memiliki corak komando yang kuat. Corak tersebut dapat dipahami karena operasi berlangsung dalam keadaan darurat dan penetapan identitas mempunyai konsekuensi ilmiah serta hukum. Namun, kepemimpinan

CC BY-SA 4.0

fasilitatif tidak cukup hanya dengan memberikan instruksi, tetapi juga harus menjaga dialog lintas instansi, akses terhadap informasi, pengakuan kontribusi setiap pihak, dan keterlibatan aktor dalam menyelesaikan masalah. Tantangan lainnya adalah setiap instansi mempunyai jalur komando sendiri sehingga efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan membangun kesepahaman, melakukan komunikasi persuasif, dan memperoleh dukungan tanpa mengambil alih kewenangan pihak lain. Temuan penelitian ini sejalan dengan Gunawan Widjaja dan Handojo Dhanudibroto (2025), yang menempatkan kepemimpinan sebagai salah satu faktor penting dalam koordinasi antarlembaga, serta mendukung Neisya Al Mandita dan Resa Aprilia (2024), yang menekankan pentingnya kepemimpinan dan budaya organisasi inklusif dalam kolaborasi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kepemimpinan fasilitatif telah diwujudkan melalui kemampuan mempertemukan aktor, memberikan arah, membagi tugas, memfasilitasi kebutuhan, menjaga komunikasi, mengelola perbedaan, dan membangun kepercayaan. Namun, dialog yang setara, mekanisme mediasi, akses informasi keluarga, dan pelembagaan fungsi fasilitasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, indikator kepemimpinan fasilitatif dapat dinilai telah terpenuhi dengan baik, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan. Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan kolaboratif, penetapan petugas penghubung setiap instansi, prosedur penyelesaian perbedaan, forum evaluasi lintas instansi, dan mekanisme komunikasi khusus bagi keluarga.

## Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan inti model collaborative governance Ansell dan Gash (2008). Proses tersebut tidak berlangsung secara linear, tetapi membentuk siklus yang terdiri atas dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dalam operasi DVI Gempa Cianjur Tahun 2022, proses kolaborasi berlangsung sejak pencarian dan evakuasi, penerimaan serta registrasi korban, pemeriksaan post mortem, pengumpulan data ante mortem, rekonsiliasi, penetapan identitas, hingga penyerahan jenazah kepada keluarga. Setiap tahapan melibatkan aktor, kompetensi, dan sumber informasi yang berbeda sehingga keberhasilan identifikasi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis Tim DVI, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak mengintegrasikan pekerjaan dan menggunakan informasi bersama.

Dialog dalam operasi DVI berlangsung melalui briefing, rapat koordinasi, diskusi teknis, komunikasi langsung di Pos DVI, evaluasi, pelayanan ante mortem, dan rekonsiliasi. Forum tersebut membahas perkembangan jumlah korban, hasil pencarian dan evakuasi, kesiapan pemeriksaan, kelengkapan data, kebutuhan personel dan fasilitas, serta pembagian tindak lanjut. Dialog juga melibatkan keluarga korban yang memberikan keterangan mengenai identitas, ciri fisik, riwayat medis dan gigi, pakaian, properti, dokumen kependudukan, serta hubungan biologis korban. Meskipun dialog langsung telah dilaksanakan, tidak seluruh komunikasi dapat dilakukan secara serentak karena banyaknya aktor yang terlibat. Sebagian informasi diteruskan melalui jalur berjenjang, telepon, radio, dan grup WhatsApp. Saluran tersebut mendukung kecepatan, tetapi persoalan teknis yang menyangkut kecocokan data dan keputusan identifikasi tetap membutuhkan pembahasan langsung.

Kepercayaan antarinstansi tumbuh melalui pengakuan terhadap kewenangan dan kompetensi setiap pihak. Tim DVI mempercayai Basarnas untuk menjalankan pencarian serta evakuasi, menggunakan data Disdukcapil dan Inafis serta informasi wilayah dari BPBD, sedangkan instansi lain mempercayakan pemeriksaan dan penetapan identitas kepada tenaga DVI dan forensik. Kepercayaan tersebut tidak berarti informasi diterima tanpa pemeriksaan karena setiap data tetap harus dicatat, diverifikasi, dan dapat ditelusuri. Dalam hubungan dengan keluarga, kepercayaan dibangun melalui pelayanan yang jelas, perlindungan data, serta penyampaian hasil setelah identitas terverifikasi. Ketepatan pelabelan kantong jenazah, informasi lokasi penemuan, dokumentasi post mortem, dan pengumpulan data ante mortem juga memengaruhi kualitas rekonsiliasi sehingga kesalahan pada satu tahapan dapat mengurangi kepercayaan terhadap keseluruhan proses.

Komitmen terhadap proses terlihat dari keberlanjutan keterlibatan Tim DVI, Basarnas, BPBD, kepolisian kewilayahan, rumah sakit, Disdukcapil, Inafis, pemerintah daerah, dan keluarga sejak awal sampai akhir

CC BY-SA 4.0

operasi. Masing-masing menjalankan fungsi berbeda, tetapi menyadari bahwa proses identifikasi tidak dapat diselesaikan apabila salah satu tahapan terputus. Komitmen juga diwujudkan melalui kesediaan melakukan penyesuaian ketika data ante mortem belum mencukupi atau beban pemeriksaan meningkat. Namun, rasa memiliki terhadap proses belum sepenuhnya setara karena Tim DVI memiliki posisi dominan dalam aspek teknis akibat kewenangan penetapan identitas. Posisi tersebut dapat dipahami, tetapi kontribusi instansi lain dan keluarga tetap perlu diakui agar kolaborasi tidak dipersepsikan hanya sebagai penyerahan informasi kepada Tim DVI.

Pemahaman bersama terbentuk dari tujuan kemanusiaan untuk memberikan kepastian identitas secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Para aktor memahami bahwa kecepatan tidak boleh mengurangi ketelitian dan penetapan identitas harus didasarkan pada perbandingan data ante mortem dan post mortem melalui rekonsiliasi. Pemahaman bersama juga terlihat dalam pembagian fungsi setiap aktor. Perbedaan pemahaman pada awal operasi dikurangi melalui briefing, rapat koordinasi, pengarahan, dan penegasan pembagian tugas. Namun, pemahaman belum sepenuhnya merata pada seluruh personel dan keluarga karena pergantian atau penambahan personel memerlukan pengarahan ulang, sedangkan keluarga belum selalu memahami istilah teknis dan struktur pelayanan.

Hasil sementara terlihat dari pembentukan Pos DVI dan Pos Ante Mortem, tersusunnya pembagian tugas, diterimanya korban dari Basarnas, terkumpulnya laporan orang hilang, tersedianya data ante mortem dan post mortem, serta penetapan identitas secara bertahap. Laporan akhir mencatat bahwa operasi berlangsung sejak 21 November sampai 20 Desember 2022. Tim DVI menerima 176 kantong jenazah dari Basarnas, menangani 121 laporan orang hilang, dan mengidentifikasi 163 jenazah, sedangkan 10 objek belum teridentifikasi, terdiri atas tiga jenazah utuh dan tujuh bagian tubuh. Data tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menghasilkan capaian nyata, tetapi belum menyelesaikan seluruh objek pemeriksaan. Capaian identifikasi memperkuat kepercayaan dan komitmen, sedangkan objek yang belum teridentifikasi menunjukkan perlunya keberlanjutan pengelolaan data, penyimpanan sampel, dan pemeriksaan ketika data pembanding baru tersedia.

Integrasi data ante mortem dan post mortem dalam rekonsiliasi menunjukkan bahwa proses kolaborasi bukan hanya tahapan teknis, tetapi juga ruang kolaboratif karena mempertemukan data, kewenangan, dan kompetensi dari berbagai pihak. Tidak ada satu aktor yang mampu menyediakan seluruh informasi. Penetapan identitas merupakan hasil kontribusi kolektif, meskipun keputusan akhirnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan profesional. Kelima unsur proses kolaborasi tersebut membentuk siklus: dialog menghasilkan pertukaran informasi dan klarifikasi; interaksi yang konsisten membangun kepercayaan; kepercayaan memperkuat komitmen; komitmen dan komunikasi membentuk pemahaman bersama; sedangkan hasil identifikasi memperkuat keyakinan untuk mempertahankan kolaborasi.

Temuan penelitian ini mendukung Neisya Al Mandita dan Resa Aprilia (2024), yang menyatakan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan efisiensi melalui komunikasi, keterbukaan, kepemimpinan, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Temuan tersebut juga sejalan dengan Gunawan Widjaja dan Handojo Dhanudibroto (2025), terutama mengenai pentingnya komunikasi dan integrasi data dalam kolaborasi antarlembaga. Namun, dalam operasi DVI, efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kemampuan menjaga validitas, keamanan data, dan akurasi penetapan identitas. Proses kolaborasi dalam operasi DVI telah melampaui pembagian kerja administratif karena para aktor melakukan dialog, membangun kepercayaan, menyesuaikan tindakan, dan bergantung pada kontribusi masing-masing untuk menghasilkan identitas korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis, proses kolaborasi dapat dinilai telah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kekuatan utamanya terletak pada dialog operasional, kepercayaan terhadap kompetensi, komitmen kemanusiaan, pemahaman tujuan bersama, dan capaian identifikasi. Kelemahannya meliputi integrasi data, dokumentasi keputusan, pemerataan akses informasi, mekanisme umpan balik keluarga, dan tindak lanjut pascaoperasi. Penguatan dapat dilakukan melalui forum lintas instansi yang terjadwal, pusat data yang aman dan terintegrasi, penunjukan petugas penghubung, dokumentasi keputusan kolaboratif, mekanisme umpan balik keluarga, serta pengelolaan berkelanjutan terhadap data dan sampel korban.

CC BY-SA 4.0

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dengan instansi terkait dalam penanganan identifikasi korban Gempa Cianjur Tahun 2022 telah berjalan cukup efektif berdasarkan terpenuhinya indikator penelitian, tetapi belum sepenuhnya optimal dan terlembagakan. Koordinasi didukung oleh kejelasan pembagian tugas, kompetensi personel, pengalaman kerja sama, kesamaan tujuan kemanusiaan, komitmen profesional, dukungan pimpinan, keberadaan Pos DVI, fasilitas rumah sakit, dan keterlibatan keluarga korban. Faktor penghambatnya meliputi perubahan kondisi lapangan, kerusakan akses dan dokumen korban, keterbatasan data ante mortem, komunikasi berjenjang, belum terintegrasinya data antarinstansi, ketidakmerataan tenaga ahli, serta tingginya beban kerja personel.

Temuan konseptual penelitian menunjukkan pola kolaborasi antarinstansi dengan koordinasi terpadu dan otoritas teknis terpusat. Koordinasi terpadu menghubungkan tugas, informasi, kompetensi, dan sumber daya, sedangkan proses kolaboratif membangun partisipasi serta kepercayaan. Otoritas teknis Tim DVI tetap terpusat untuk menjaga validitas dan akuntabilitas penetapan identitas. Dengan demikian, koordinasi Tim DVI Polri dengan instansi terkait telah mendukung pelaksanaan identifikasi korban, tetapi masih memerlukan penguatan pada integrasi data, pemerataan informasi dan tenaga ahli, serta pelembagaan kolaborasi agar penanganan identifikasi korban bencana dapat dilaksanakan secara lebih terpadu, akurat, berkelanjutan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA


Al Mandita, N., & Aprilia, R. (2024). Kolaborasi dan koordinasi: Kunci untuk mencapai efisiensi dalam organisasi. Prosiding Seminar Nasional Manajemen.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571 https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Handayaningrat, Soewarno. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mujiadi. (2019). Koordinasi horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pangandaran. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Nasyanti, P. (2023). Practical understanding of specialization and coordination in public organizations to observe how Indonesia copes with the worldwide pandemic of COVID-19. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 146–153. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10888

Pratama, Rio Surya. (2019). Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 7(3), 1337–1350.

Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). Laporan kegiatan Operasi Aman Nusa II Lodaya 2022 tahap 1, 2, 3, dan 4 tanggal 21 November–20 Desember 2022 pada korban gempa bumi dan longsor di Cianjur, Jawa Barat, Satgas 3 DVI [Laporan internal].

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi, Cetakan ke-38). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim detikJabar. (2022, 13 Desember). Fakta-fakta baru soal korban meninggal akibat Gempa Cianjur. detikJabar. detikJabar

Widjaja, Gunawan, & Dhanudibroto, Handojo. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 4(7), 1323–1332. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945.


CC BY-SA 4.0